



# PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



**PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN**

**Urusan : Non Urusan**

**1 Program\_23  
Kegiatan\_83 Sub  
Kegiatan**

**Rp. 51.493.357.726,-**

**Urusan Pemerintahan  
Bidang Lingkungan  
Hidup**

**10 Program\_14  
Kegiatan\_36 Sub  
Kegiatan**

**Rp. 11.132.885.000,-**

**Urusan Pemerintahan  
Bidang Kehutanan**

**4 Program\_18  
Kegiatan\_52 Sub  
Kegiatan**

**Rp. 4.292.500.000,-**

# PAGU MURNI APBD DLHK TAHUN ANGGARAN 2024

15  
PROGRAM

55  
KEGIATAN

171  
SUB KEGIATAN

PAGU TA. 2024  
Rp. 66.918.742.726

Penyediaan Gaji dan  
Tunjangan ASN  
Rp. 36.194.597.798

Belanja Barang, Jasa  
dan Modal  
Rp. 30.724.144.928

Kegiatan Rutin  
(Pemeliharaan, Pengadaan,  
Penyediaan)  
Rp. 7.378.972.928

1. Penyediaan Adinistrasi  
Pelaksanaan Tugas ASN  
(Honorarium ASN)  
2. Penyediaan Jasa  
Pelayanan Umum Kantor  
(Honorarium Non ASN  
Rp. 7.919.787.000

Belanja Kegiatan Urusan  
Lingkungan Hidup  
Rp. 11.132.885.000,-

Belanja Kegiatan  
Urusan Kehutanan  
Rp. 4.292.500.000,-

## KEGIATAN PER URUSAN DAN PROGRAM

NO	Urusan/ Program	Jumlah Kegiatan/ Sub Kegiatan
<b>A</b>	<b>NON URUSAN</b>	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23 Kegiatan 83 sub kegiatan
<b>B</b>	<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2 Kegiatan 5 sub kegiatan
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3 Kegiatan 15 sub kegiatan
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1 Kegiatan 1 sub kegiatan
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah (B3)	1 Kegiatan 2 sub kegiatan
5	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	2 Kegiatan 2 sub kegiatan
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1 Kegiatan 4 sub kegiatan
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1 Kegiatan 1 sub kegiatan
8	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Kegiatan 2 sub kegiatan
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1 Kegiatan 3 sub kegiatan
10	Program Pengelolaan Persampahan	1 Kegiatan 2 sub kegiatan

NO	Urusan/ Program	Jumlah Kegiatan/ Sub Kegiatan
<b>A</b>	<b>URUSAN KEHUTANAN</b>	
1	Program Pengelolaan Hutan	10 Kegiatan 27 sub kegiatan
2	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	6 Kegiatan 19 sub kegiatan
3	Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Kegiatan 3 sub kegiatan
4	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1 Kegiatan 3 sub kegiatan

## kegiatan DLHK

No	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK Wilayah LT
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK Wilayah LT
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK Wilayah LT
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK Wilayah PSC
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK Wilayah PSC
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK Wilayah PSC

No	
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Lab. Ling
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Lab. Ling
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD SPTH
17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH
18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH
20	Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA
21	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA
23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
24	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)Provinsi
25	Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi

No	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
26	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
27	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Lab. Lingk.
28	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Lab. Lingk
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>
29	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>
30	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>
31	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>
32	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
33	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH



No	
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>
34	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>
35	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
<b>X</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
36	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
<b>XI</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>
37	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
<b>XII</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>
38	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
39	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
40	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
41	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000m <sup>3</sup> /tahun

No	Kegiatan
42	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK LT
43	: Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m <sup>3</sup> /Tahun CDLHK LT
44	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK PSC
45	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m <sup>3</sup> /Tahun CDLHK PSC
46	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD SPTH
47	Perbenihan Tanaman Hutan
<b>XIII</b>	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>
48	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
49	: Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK LT
50	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDLHK Wilayah LT
51	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK Wilayah PSC
52	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDLHK PSC
53	Pengelolaan Tahura Provinsi

No	
<b>XIV</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>
54	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di BidangKehutanan
<b>XV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>
55	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam DaerahKabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi